

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 1997:210).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan. Secara konseptual teoritik partisipasi melahirkan berbagai pendapat dari para ahli, di antaranya dari Keit Davis, Sastropoetra (2005:75) yang mengatakan bahwa: Partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada laporan

kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil program pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut lebih lanjut Bintoro Tjokromidjojo (1993:207) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Dalam hal ini pemerintah di harapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Satu hal yang perlu di ingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, mereka tidak diikutsertakan. Selain itu dalam penyusunan program pembangunan, maka harus melibatkan masyarakat, karena sangat sulit rasanya apabila dalam pelaksanaan program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan dan pencapaian sasaran yang di inginkan.

Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat dari apatis selanjutnya menjadi dukungan untuk

berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi. Adapun partisipasi sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, Santoso Sastropoetra (1986:3). Selanjutnya dalam Santoso Sastropoetra disebutkan bahwa jenis dan bentuk partisipasi adalah: Partisipasi dengan pemikiran (Psychological Partisipation), partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif Partisipation), partisipasi dengan keahlian (With Skill Partisipation), partisipasi dengan barang (Material Partisipation), partisipasi dengan uang (Money partisipation), partisipasi dengan Jasa (service Partisipation), partisipasi dalam bentuk sumbangan spontan berupa Barang/Jasa. Apabila Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus ditingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan yang di tetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Realitanya fenomena yang terjadi di Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini masih sangat rendah. Sebagai salah satu kelurahan yang berkembang, mulai terjadi pergeseran nilai masyarakat yang awal mulanya hidup berciri seperti masyarakat pedesaan dimana kepekaan sosial masyarakat masih sangat terpelihara, berangsur-angsur berubah menjadi corak masyarakat kota, dimana kepekaan terhadap lingkungan sosial yang semakin berkurang. Fenomena ini terjadi adalah akibat dari tidak adanya lagi peran dari masyarakat dalam menentukan pemerintahan seperti di desa, dimana masyarakat sangat berperan dan terlibat aktif menentukan pemimpin di desanya (pemilihan

kepala desa), hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan yang ada dikelurahan, dimana pemerintah kelurahan (lurah) tidak lagi dipilih dari masyarakat, tetapi ditentukan oleh wali kota.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran atau ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan, karena dalam organisasi pemerintahan kelurahan kegiatan pembangunan terbesar adalah pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau proyek-proyek pembangunan langsung ditentukan oleh wali kota, walaupun setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan kelurahan, namun seringkali keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut harus kandas pada tingkat kecamatan, sehingga mencermati tidak atau jarang ditindaklanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan tersebut berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide-ide pemikiran dalam rencana pembangunan.

Partisipasi dalam hal tenaga yang diberikan oleh masyarakat dikelurahan rancabolang kecamatan gedebage sesuai dengan pengamatan awal penulis dirasa masih cukup baik, namun tidak serta merta masyarakat ingin berpartisipasi dengan satu kali panggilan, dalam hal ini kepala lingkungan harus berkali-kali memanggil masyarakat lewat pengeras suara (corong) yang ada di masing-masing lingkungan untuk datang bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya partisipasi dalam bentuk uang dan barang yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kelurahan rancabolang sesuai dengan pengamatan awal penulis ditemukan adanya keberagaman, ada beberapa anggota masyarakat yang dengan senang hati memberikan partisipasi dalam

bentu uang maupun barang, namun ada pula yang menolak berpartisipasi dalam memberikan uang dan barang.

Fenomena yang diuraikan tersebut yaitu kurangnya partisipasi yang diberikan masyarakat didominasi oleh beberapa faktor yang menurut penulis masih menjadi dugaan sementara, yaitu dari faktor intern adalah kurangnya kemauan dan kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi, hal ini perlu adanya pembinaan dan motivasi dari aparat kelurahan. Faktor selanjutnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat yang ada dikelurahan rancabolang akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang hidup berdampingan untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, dan faktor yang terakhir adalah penghasilan atau tingkat pendapatan dari masyarakat itu sendiri, semakin besar tingkat pendapatan biasanya akan memberikan nilai partisipasi yang baik, namun semakin sedikit tingkat pendapatan akan memberikan nilai partisipasi yang buruk, walaupun hal tersebut tidak menjadi ukuran baku, namun ketiga faktor yang diuraikan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Adapun sekretariat LPMD Rancabolang berlokasi di Jl. Gedebage Selatan No. 280 RT. 02 RW. 01 Kota Bandung. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan langkah awal untuk Pemerintahan Kelurahan Rancabolang, maka LPMD di sambut baik oleh masyarakat sebagai wadah penyelenggaraan rencana program pembangunan partisipatif dan menjadi standar kinerja keberhasilan dalam pembangunan.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terkesan untuk melakukan penelitian dengan judul: Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pembangunan Rancabolang (Studi Deskriptif LPM Kelelurahan Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung).

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas peneliti merumuskan permasalahan untuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi LPM Rancabolang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pengelola LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data yang akan di gunakan untuk menjawab yang telah dirumuskan.

1. Untuk mengetahui strategi LPM rancabolang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pengelola LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pemabangunan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan aspek teoritik maupun aspek praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Kegunaan secara teoritik dapat memberikan pengembangan Konsep-konsep keilmuan, penelitian di harapkan dapat menambah informasi ilmiah atau pengetahuan

yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi terhadap Pembangunan Rancabolang.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dilihat dari sudut objek yang diteliti, memberikan kontribusi pemikiran, dan dapat memberikan masukan terutama terhadap hal partisipasi masyarakat menuju pembangunan desa.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Hendryk (2013). Dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada setting penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding peneliti-peneliti terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), serta digunakannya Undang-undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam peneliti ini.

Penelitian Arianto (2011). Tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan Pulo Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dengan adanya partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga di Pulo Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah mengalihkan pengertian partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap kaum tersisi.

Penelitian Megawati (2008). Yang dilakukan dalam bentuk disertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kelurahan di Kotamadya Jakarta Selatan), partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikasi dalam posisi yang tidak berbeda sebagai subjek, akan meningkatkan keterlibatan mental atau emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

2. Landasan Teoritis

Lembaga pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebagai mitra pemerintah dan membantu pemerintah tetapi menekankan kepada kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang paling penting dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus menerus melanda di kehidupan umat manusia menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat lokal sebagai sarana percepatan proses pembangunan (Craig dan Mayo : 1995).

Adanya lembaga kemasyarakatan menurut perspektif Islam adalah kesadaran akan eksistensi dirinya sebagai makhluk Tuhan yang paling tunggal dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-mahluk Tuhan yang lainnya. Bermula dari sini manusia diuntut untuk menjalankan tugas kekhalifahannya dengan cara membangun

dan mengelola dunia ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh sang pemilik dunia.

Sedangkan lembaga dalam perspektif sosiologi, lembaga merupakan suatu sistem integrasi. Yang mencakup hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Masyarakat sebagai bagian dari lembaga yang dapat di definisikan agen kemandirian dan kesejahteraan; pada sisi lain, LPM perlu bernegosiasi dengan struktur pemerintahan lokal dan nasional sebagai partnership dengan mereka sebagai sektor private ke arah pendekatan yang lebih strategis. Bila keadaan LPM seperti itu, perlu mengembangkan jaringan, kampanye, dan lobi internasional atas nama pemerintah untuk menghadapi skala global (Clarke : 1991).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat (yang umumnya lebih miskin) untuk sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara profesional. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus di artikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. (Totok Mardikanto, 2012:83)

Menurut Kartasasmita (1997) menegaskan bahwa, pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Terkait

dengan kajian tentang pembangunan, Muhi Et, Al (1993) mengemukakan beberapa teoritis, sebagai berikut:

Pertama Teori Perubahan Sosial dari Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk “Pembagian Pekerjaan”. Sedangkan Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karenanya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan.

Kedua Teori Struktural Fungsional dari Persons (1851) yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial terjadi.

Ketiga Teori Ekonomi dari Gunar Mirdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:

1. Hasil Pendapatan.
2. Tingkat Produktivitas.
3. Tingkat Kehidupan.
4. Sikap dan Pranata. Dan
5. Rasionalitas.

Keempat Teori Konflik yang dicetuskan oleh Karl Max (1919-1883) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas tertindas (buruh).

Kelima Teori Ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin oleh Fran (Wilber, 1979) Negara maju mendominasi Negara yang belum berkembang,

sedemikian rupa sehingga pembangunan di Negara yang belum maju yang menjadi “Penjajah” nya. (Mardikanto, 2012: 9/10)

Dharmawan (2002) dalam bukunya Hary Hikmat mengungkapkan adanya pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan secara gradual dan tak berulang yang didalamnya diisi oleh usaha atas rencana yang dibuat secara rinci dan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan, pertumbuhan dan perbaikan. Dari konsep pembangunan tersebut merupakan respon dari pembangunan ekonomi yang telah lama mendominasi model-model pembangunan.

Setidaknya terdapat beberapa unsur penting yang sekaligus merupakan prasyarat suatu aktifitas agar dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan, tak berulang, setidaknya mengandung makna bahwa pembangunan memiliki dinamika dari suatu rangkaian proses yang sistematis;
2. Pembangunan memuat, berisikan usaha-usaha atau realisasi atas rencana-rencana yang dibuat secara rinci, dalam hal ini pernyataan dimaksud sangat terkait dengan aktifitas eksplorasi, identifikasi, klasifikasi atas berbagai masalah dan potensi pembangunan;
3. Bahwa pembangunan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan dan pertumbuhan atau perbaikan, artinya pembangunan termotivasi atas usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis manusia yang bersifat prioritas..

Dalam kaitan antara pelaksana pembangunan masyarakat desa dengan partisipasi dari masyarakat maka penting adanya organisasi atau lembaga yang disamping berfungsi sebagai wahana partisipasi, dan juga berfungsi sebagai pengelola kegiatan pembangunan.

Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), dengan demikian jelaslah bahwa LPM merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang

tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi, aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Dari uraian tersebut maka dapat diambil gambaran sebagai kerangka berpikir penulis bahwa kepentingan LPM dalam pembangunan masyarakat harus saling komplementer, pemerintah juga mengalami ketebatasan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk konteks Indonesia, konsep *community development* lebih memungkinkan untuk menerapkan model pendekatan *locality development* (pembangunan lokal) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis.

Adanya LPM merupakan wahana partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dengan pembangunan masyarakat, bahwa pembangunan masyarakat harus berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi LPM merupakan wahana bagi masyarakat untuk menunjukkan kebutuhan dan aspirasinya dalam rangka pembangunan masyarakat dan juga menjembatani hubungan timbal balik antara pemerintah yang sering disebut sebagai perencana kegiatan pembangunan dengan masyarakat yang di tuntut aktif berperan serta dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

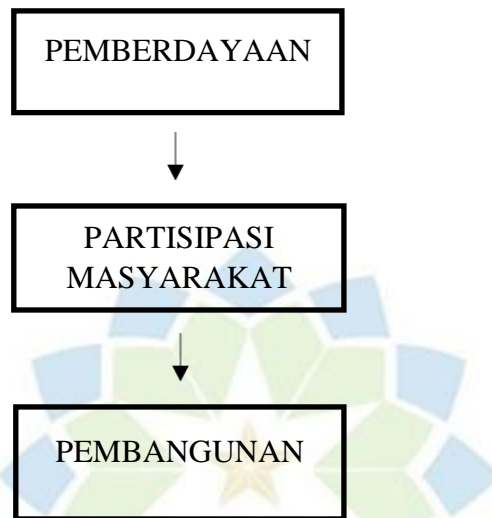
H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Jack Rothman dalam bukunya Harry Hikmat (2013) menyusun dan merumuskan tiga model dalam menyusun pembangunan masyarakat terhadap aspek pemberdayaan, yaitu :

- A. *Pembangunan Lokal*, mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan.
- B. *Perencanaan Sosial*, model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, perumahan (permukiman), kesehatan mental, dan masalah sosial lainnya. Selain itu, model ini menganggap betapa penting menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional.
- C. *Aksi Sosial*, model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Juga,

meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial atau demokrasi.

3. Landasan Konseptual



F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan operasional penelitian, maka penulis mengambil langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini yang berdasarkan fakta-fakta masalah yang di teliti dengan alasan menggunakan metode ini, peneliti meneliti, memaparkan dan menggambarkan tentang kondisi objektif peran LPMD dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Rancabolang dalam hal ini peneliti mengumpulkan klasifikasi mengolah serta menganalisis data kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan.

b. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berkaitan

dengan program LPMD, pelaksanaan kegiatan, keberhasilan LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Rancabolang terhadap pembangunan Desa.

c. Sumber Data

Data penelitian digolongkan sebagai data *primer* dan *sekunder* Saifuddin (1999:91). Didalam penelitian ini bersumber data yang dipakai terbagi kedalam dua bagian, yaitu data *primer* dan bersumber data *sekunder*.

Sumber data *primer* diperlukan memperoleh informasi secara langsung di lapangan terutama partisipasi bagi pengembangan desa, melalui wawancara mendalam, kepada tokoh masyarakat, masyarakat desa Rancabolang, dan pengurus LPMD. Sedangkan data *sekunder* untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan berasal dari buku-buku majalah, dokumentasi, dan pelatilah brosur.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dalam studi pustaka ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undangan-undangan, koran, media masa, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dimaksud untuk melaksanakan penelitian pada lokasi atau objek yang telah di tentukan secara langsung Studi Lapangan yang ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencarian secara sistematis terhadap gejala yang tampak terhadap gejala yang diamati. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Wawancara adalah percakapan dengan orang yang akan memberikan informasi secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan tatap muka antara peneliti dengan pihak LPMD.
- c. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui pembacaan dokumen-dokumen baik sumber primer ataupun yang sekunder. Peneliti berusaha mendapatkan data-data dokumentasi yang berada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), seperti berkas-berkas dan arsip-arsip yang saling berhubungan bersama masalah yang ditulis.

G. Analisis Data

Menurut Agus Ahmad Safe'i (2003:145) Analisis data merupakan tafsiran terhadap data yang telah terkumpul sehingga analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti.

Nana Sudjana (1991:6) Untuk menganalisis data yang terkumpul, secara kualitatif digunakan pendekatan logika dengan berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus. Kemudian untuk menganalisis data terkumpul, digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara direduksi menjadi beberapa golongan sehingga data terkumpul dapat tersusun secara sistematis menurut sejenisnya.

2. Menghubungkan Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan perhubungan data dari yang satu ke yang lain, agar data yang terkumpul dapat disusun dengan lengkap.

3. Menafsirkan

Data yang telah tersusun dari hasil perhubungan data kemudian di tafsirkan sehingga menjadi kumpulan data yang lengkap.

4. Menarik Kesimpulan

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang terkumpul agar memudahkan dalam penguasaan data.

